



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI X DPR RI
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 15-19 FEBUARI 2021**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21 dan Pasal 23 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan.
2. UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69, 70, 71, 72, 73 tentang tugas DPR RI terhadap legislasi, anggaran dan pengawasan, serta Pasal 98 ayat (4) huruf f.
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI.
 - b. Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan.
 - c. Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok masa reses pada masa persidangan III tahun sidang 2020-2021.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 Januari 2021 tentang rencana kunjungan kerja Komisi X DPR RI masa reses masa persidangan III tahun sidang 2020-2021 ke Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan, Provinsi Sumatera Barat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah dan masyarakat mengenai implementasi Undang-Undang, dan melakukan pengawasan implementasi kebijakan Pemerintah, serta menggali dan menyerap aspirasi dari daerah.

Tujuan kunjungan kerja ini adalah:

- a. Untuk mendapatkan masukan berupa data-data faktual bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, perpustakaan, di Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Untuk mendapatkan masukan terkait pokok-pokok substansi pembangunan nasional yang dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi X DPR.
- c. Memantau secara langsung implementasi rekomendasi beberapa Panja Pengawasan Komisi X DPR RI, kendala dan permasalahannya, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kunjungan Kerja Komisi X DPR-RI meliputi (1) Bidang Pendidikan; (2) Bidang Kebudayaan; (3) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (4) Pemuda dan Olahraga; dan (5) Bidang Perpustakaan.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. (F- PDIP) didampingi oleh pejabat dari mitra kerja Komisi X DPR RI, yaitu: Dr. Yaswardi, M.Si (Direktur GTK dan Pendidikan Menengah Khusus Kemendikbud RI), Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd (Direktur SD Kemendikbud RI), Rizki Handayani Mustafa (Deputi Bidang Produk Wisata dan penyelenggaraan Kegiatan Kemenpar RI), Anggara Hayun Anujuprana (Kepala Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenpar RI), Dr. Raden Isnanta, M.Pd (Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI), Dr. Samsudin, M.Pd (Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga Kemenpora RI), Drs. Imam Gunawan, MAP (Aseten Deputi Kewirausahaan Pemuda pada Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora RI), dan Drs.Teguh Purwanto, S.IP. M.Si. (Kepala Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara Perpustakaan RI).

Tim ini juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

E. AGENDA KUNJUNGAN KERJA

Agenda kegiatan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Melakukan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang dihadiri:
 - a. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. Muspida Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
 - d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
 - e. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
 - f. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Selatan.
 - g. Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
 - h. Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Provinsi Sumatera Selatan.
 - i. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
 - j. Pimpinan organisasi profesi Guru Provinsi Sumatera Selatan.
 - k. Kepala LPMP Provinsi Sumatera Selatan.
 - l. Pimpinan Organisasi Kepemudaan di Sumatera Selatan.
 - m. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Selatan.
 - n. Ketua KONIDA Provinsi Sumatera Selatan.
 - o. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
 - p. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri: Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya, UIN Raden Patah Palembang.

- q. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta: Universitas Baturaja, Universitas Bina Darma, Universitas PGRI Palembang, Universitas Palembang.
 - r. Ketua L2DIKTI Wilayah II Provinsi Sumatera Selatan.
 - s. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Sumatera Selatan.
 - t. Asosiasi Agen Tour dan Travel Indonesia (ASITA) Provinsi Sumatera Selatan.
 - u. Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Provinsi Sumatera Selatan.
 - v. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Sumatera Selatan.
 - w. Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO) Provinsi Sumatera Selatan.
 - x. Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI) Provinsi Sumatera Selatan.
 - y. Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) Provinsi Sumatera Selatan.
 - z. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Sumatera Selatan.
 - aa. Hotel Human Resources Managers Association (HHRMA) Provinsi Sumatera Selatan.
 - bb. Himpunan Penulis Pariwisata (HPP) Provinsi Sumatera Selatan.
 - cc. Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Provinsi Sumatera Selatan.
2. Tinjauan lapangan bidang pariwisata, ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan sebelum acara pertemuan ke:
- a. Museum Al-Quran Raksasa Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Museum Negeri Balaputra Dewa Provinsi Sumatera Selatan .
 - c. Kriya Sriwijaya Provinsi Sumatera Selatan.

II. ISI LAPORAN

A. IDENTIFIKASI DATA DAN INFORMASI

1. Umum

- a. Dalam upaya menangani Pandemi COVID-19, dari sisi anggaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta Dana Insentif Daerah (DID) yang diarahkan pada Bidang Kesehatan, penanganan jejaring sosial dan bantuan bagi dunia usaha dengan berbagai bentuk jenis bantuan diantaranya pemberian materi sembako, pelatihan keahlian, sekaligus memberikan bantuan alat untuk para pelaku UMKM maupun ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini diharapkan dapat menggenjot perekonomian masyarakat dengan tetap mengutamakan aspek Kesehatan masyarakat.
- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 420/12553/Disdik.SS/2020 tentang Penundaan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap 2020/2021. Penundaan kegiatan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan masih tingginya kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Himbauan kepada bupati dan walikota se Provinsi Sumsel untuk menunda pembelajaran tatap muka di semua satuan pendidikan dan dialihkan

secara pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring/luring/modul pembelajaran lainnya. Penundaan pembelajaran tatap muka dilakukan sampai vaksin COVID-19 didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota dan setelah dilihat perkembangan kasus COVID-19 per daerah Kabupaten/Kota.

- c. Melalui prioritas daerah Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi dijabarkan dalam program prioritas daerah Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan prioritas daerah yaitu; (1) Pengelolaan Pendidikan dan Perizinan Pendidikan, (2) Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (3) Pengembangan Kurikulum, (4) Pengembangan Bahasa dan Sastra, (5) Pembinaan Perpustakaan, dan (6) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
- d. Penerapan protokol Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang dituangkan dalam berbagai kebijakan Pemerintah Daerah yang dikemas dengan regulasi berbagai produk hukum baik Keputusan Gubernur, Peraturan Gubernur maupun Edaran Gubernur yang diimplementasikan dengan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) diharapkan mampu menekan laju pandemi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

2. Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan kementerian sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
 - 2) Kesehatan dan Keselamatan Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Keluarga dan Masyarakat merupakan prioritas Utama dalam menetapkan Kebijakan Pembelajaran.
 - 3) Sebagai bentuk layanan dan pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik, maka kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dalam bentuk Belajar Dari Rumah (BDR) dengan menggunakan 2 metode yaitu Daring (Dalam Jaringan)/online atau Luring (Luar Jaringan) berdasarkan pemetaan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh orangtua peserta didik oleh Satuan Pendidikan.
- b. Evaluasi terhadap program dan kegiatan kementerian, seperti:
 - a. **PIP Bidang PKLK**

Program Indonesia Pintar yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu adalah sangat tepat, karena sangat membantu siswa dari keluarga yang prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Namun demikian masih terdapat pemberian KIP ini belum tepat sasaran, masih ada siswa yang menerima KIP orang tuanya mampu. Oleh karena masih perlu pendataan yang lebih tepat dan konkrit.
 - b. **BOS Bidang PKLK**
 - a) Dengan adanya program sekolah gratis Bantuan Operasional Sekolah sangat membantu sekali bagi sekolah negeri maupun swasta khususnya bagi sekolah yang tidak berbayar, kami

- berharap adanya penambahan dana BOS bagi Sekolah Luar Biasa bagi anak berkebutuhan khusus.
- b) Disarankan agar pihak Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten dapat mendapatkan akses data SK penerima BOS, karena pengalaman tahun 2020 pihak Dinas Pendidikan belum menerima SK secara keseluruhan.
 - c) Pengelola BOS Provinsi tidak dapat mengetahui permasalahan penyebab sekolah-sekolah yang tidak menerima dana BOS, apakah karena belum menyampaikan laporan atau karena DAPODIK-nya bermasalah.
 - d) Terdapat kesulitan menyusun RKAS 2021 karena belum ada petunjuk teknis dan perbedaan unit cost dari tiap-tiap kabupaten/kota.
- c. **PPDB Bidang SMA**
- a) Penentuan besarnya prosentase Calon Peserta Didik yang diterima melalui jalur PPDB (zonasi, afirmasi, mutasi, prestasi) sebaiknya tidak ditentukan oleh Kemendikbud, tetapi diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukannya sendiri sesuai semangat Otonomi Daerah.
 - b) Untuk pelaksanaan PPDB melalui jalur prestasi hendaknya diberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah guna melaksanakannya dengan sistem Tanpa Tes atau Penelusuran Minat dan Prestasi (PMPA) dan/atau dengan menggunakan sistem Tes Potensi Akademik (TPA).
- d. **Pembelajaran Jarak Jauh Provinsi Sumatera Selatan**
- a. **Bidang SMK:**
 - 1) Pembelajaran jarak jauh di Provinsi Sumsel pada masa Pandemi COVID-19 untuk SMK relatif solutif terhadap permasalahan yang dihadapi walaupun dirasa kurang efektif, sebab prosentase pembelajaran di SMK 30% teori dan 70% praktik.
 - 2) Untuk pembelajaran teori cukup efektif dengan PJJ melalui berbagai teknologi komunikasi dan media sosial. Tetapi untuk pembelajaran praktik disubstitusi dengan pembelajaran portofolio berbasis project, kewirausahaan mandiri dan kelompok serta *job orientation*.
 - 3) Efektivitas pembelajaran pengganti praktik ini dirasakan masih kurang, tetapi demi keselamatan dan kesehatan semua warga sekolah, hal ini menjadi opsi terbaik sangat ini.
 - b. **Bidang SMA:**
 - 1) Pembelajaran Jarak Jauh kurang efektif.
 - 2) Bagi peserta didik, kendalanya antara lain adalah terbatasnya kepemilikan sarana belajar berupa alat komunikasi (HP) berbasis android, keterbatasan *signal* internet, keterbatasan materi atau sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta kemampuan belajar secara mandiri yang masih sangat terbatas.
 - 3) Jika guru terlalu banyak memberikan tugas kepada peserta didik, maka terkadang mereka mengalami

kesulitan dalam mengerjakan tugas. Karena mereka tidak dapat bertanya atau belajar dari orang tua secara penuh.

- 4) Bagi guru, mereka kesulitan dalam mendesain materi pembelajaran berbasis IT yang menarik dan menyenangkan dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan tentang IT.
- 5) Terkadang guru memberikann tugas kepada peserta didik terlalu banyak dan tanpa membahasnya secara komprehensif.
- 6) Bagi sekolah, masih terkendala dengan minimnya sarana/prasarana terkait dengan IT dan infrastrukturnya serta keterbatasan SDM.
- 7) Bagi orang tua/wali peserta didik, terkendala dengan kemampuan pengadaan alat belajar (HP) berbasis android dan kemampuan membeli kuota internet dikarenakan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19.
- 8) Rendahnya kemampuan penguasaan materi pembelajaran jika peserta didik memerlukan bimbingan dari orang tua sedangkan latar belakang orang tua yang bukan pendidik yang menguasai substansi mata pelajaran tertentu.
- 9) Pihak Dinas Pendidikan telah berupaya keras untuk melaksanakan pengayaan dan/atau pelatihan kepada guru-guru tentang kompetensi IT.
- 10) Namun dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 maka pelaksanaan pelatihan dalam bentuk daring terkadang hasilnya kurang optimal.

c. Bidang PKLK

Pembelajaran Jarak Jauh sudah tepat dengan menjalankan proses pendidikan ditengah pandemi COVID-19, walaupun kita akui dalam pelaksanaan kurang optimal, kurang efektifnya proses pembelajaran bahkan bisa mendapat terhadap psikologi anak. Harapan kita semua semoga pademi bisa berakhir dan proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik.

e. Masukan Dan Usulan Terhadap Substansi terhadap Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

a. Bidang SMK

Penambahan substansi yang terkait dengan *local wisdom* (kearifan local) sebagai materi pembelajaran di level pendidikan dasar dan menengah.

b. Bidang SMA

- 1) Mengatur secara tegas dan jelas tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak kepada pendidi dan tenaga kependidikan.
- 2) Memberi keleluasaan yang lebih luas kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk mengembangkan perannya dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa secara lebih

bebas tetapi bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

- 3) Mengatur ketentuan tentang penggunaan sumber-sumber pendanaan bagi lembaga pendidikan yang lebih fleksibel terutama dalam rangka meningkatkan peran masyarakat untuk turut aktif memajukan dunia pendidikan dan mempertegas kewajiban negara dalam memenuhi pembiayaan pendidikan dalam jumlah yang lebih signifikan atau mencukupi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- 4) Pengembangan Kurikulum SMK pada pendidikan Vokasi dalam konteks *link and match* harus lebih fleksibel dalam menyerap masukan dan informasi kompetensi dan kultur dari industri. Dengan demikian posisi kurikulum sebagai dasar pelaksanaan *link and match* menjadi landasan yang fundamental dan kokoh sebagai pondasi langkah berikutnya dalam pelaksanaan *link and match* yaitu: pemagangan, kehadiran guru industri ke sekolah, pemagangan guru ke industri, sertifikasi keahlian oleh industri dan komitmen perekrutan oleh industri. Hal ini agar lulusan SMK dapat diterima di IDUKA.

f. **Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Selatan**

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI) wilayah yang meliputi 4 (empat) Provinsi yaitu Sumsel, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung menyampaikan bahwa Dikotomi antara PTN dan PTS dalam pandangan masyarakat sudah mulai berkurang, saat ini PTS sudah mampu menunjukkan eksistensi untuk menjadi pilihan utama juga bagi masyarakat.

Berdasarkan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) menggambarkan sebagai keadaan Tahun 2019, Jumlah Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 208 Perguruan Tinggi Swasta dan 807 Program Studi yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 208 PTS terdiri dari 32 Universitas, 1 Institut, 100 Sekolah Tinggi, 65 Akademi dan 10 Politeknik.

Keadaan Tahun 2020, Jumlah Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 205 Perguruan Tinggi Swasta dan 853 Program Studi yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 205 PTS terdiri dari 35 Universitas, 6 Institut, 96 Sekolah Tinggi, 57 Akademi dan 11 Politeknik.

Keadaan Tahun 2021, Jumlah Perguruan Tinggi Swasta sebanyak 206 Perguruan Tinggi Swasta dan 853 Program Studi yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 206 PTS terdiri dari 35 Universitas, 6 Institut, 100 Sekolah Tinggi, 58 Akademi dan 11 Politeknik.

Dari data ini terjadi pengurangan Jumlah Perguruan Tinggi dikarenakan ada Program Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan LLDIKTI Wilayah II yang diselenggarakan oleh satu Yayasan beberapa diusulkan untuk melakukan penggabungan atau perguruan tinggi yang memiliki visi dan misi yang sama mengusulkan penggabungan PT/ Penyatuan PT.

Kegiatan dosen dan tenaga kependidikan di universitas Muhammadiyah Palembang selama pandemi COVID-19 diatur dan dilaksanakan dalam bentuk dan berbagai perubahan standar, diantaranya; diawal pandemi COVID-19 dosen dan tenaga kependidikan mengikuti kegiatan menurut aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam masa PSBB dosen dan tenaga kependidikan melakukan aktivitas dari rumah (work from home). Pada masa new normal life dosen melakukan aktivitas pendidikan dan pengajaran secara daring dan bekerja dari rumah. Tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan dengan pola sif atau bergiliran secara terjadwal. Adapun masukan perguruan tinggi swasta yaitu: Kebijakan MBKM belum sepenuhnya dipahami oleh semua kalangan (baik industri, instansi pemerintah bahkan lembaga-lembaga pendidikan) bahkan bentuk pengembangannya juga belum sepenuhnya ada dalam gambaran masing-masing pelaku. Makin banyak dipahami dan makin banyak program-program kebijakan ini dikembangkan akan semakin cepat diwujudkan perbaikan bersama yang dimaksud. Oleh karena itu diperlukan:

- a. Sosialisasi secara terprogram dan terus menerus kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kebijakan Kampus Merdeka tersebut.
- b. Segera dikembangkan praktek kebijakan Kampus Merdeka disertai monitoring dan evaluasi yang intensif.

Selain itu, ada beberapa permasalahan yang di alami oleh perguruan tinggi swasta khususnya di universitas Muhammadiyah Palembang diantaranya sebagai berikut:

- a. Sumberdaya manusia sebagai pelaku pendidikan belum semuanya memiliki pengetahuan dan keterampilan mencukupi untuk melakukan transfer pengetahuan/pengalaman dalam proses pembelajaran.
- b. Sarana dan prasarana sebagai pendukung keberhasilan proses pembelajaran sering belum sepenuhnya dapat disediakan oleh lembaga pendidikan.
- c. Cepatnya perubahan peraturan tidak dapat dihindari, akan tetapi hal ini juga memberikan andil terhadap lambatnya respon yang harus diberikan oleh lembaga pendidikan. Terlebih apabila dipadukan dengan cepatnya perubahan teknologi, budaya, sosial, dll
- d. Siswa sebagai input dalam proses pembelajaran kadang-kadang memiliki kendala bawaan (pendanaan, motivasi, lingkungan, budaya, dll) yang menuntut kebijakan tersendiri.

Sedangkan permasalahan-permasalahan lain yang muncul dalam Pendidikan Tinggi khususnya di Provinsi Sumsel yaitu:

- a. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.
- b. Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik di daerah.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Melalui prioritas daerah Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Investasi, Industri, Perdagangan, UMKM dan Pariwisata dijabarkan dalam program prioritas daerah Pengembangan Seni, Budaya, dan Pariwisata selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan prioritas daerah yaitu; (1) Pengembangan Kebudayaan, (2) Pengembangan Kesenian Tradisional, (3) Pembinaan Sejarah, (4) Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, (5) Pengelolaan Permuseuman, (6) Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, (7) Pemasaran Pariwisata, (8) Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan (9) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait COVID-19 khususnya pada investasi, ekonomi kreatif sebagai berikut:

- a. Pariwisata
 - 1) pemulihan dan peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan, diskon avtur & biaya bandara
 - 2) pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik, diskon tiket, pertemuan K/L di daerah
 - 3) insentif dan paket wisata khusus untuk originasi yang sudah pulih, optimalisasi pameran terintegrasi di pasar internasional
 - 4) olah raga, seni budaya dan MICE (Mx gp, Piala Dunia U-20, konferensi internasional, dll)
 - 5) Percepatan kesiapan destinasi akselerasi infrastruktur, standar layanan, (transportasi, makanan minuman, arus wisatawan, kebersihan, keamanan)
- b. Investasi
 1. Penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian usaha: Omnibus Law Cipta Kerja
 2. Perluasan positive lists investasi: didukung kolaborasi lintas K/L dan Pemda untuk harmonisasi regulasi dan prosedur, serta fasilitasi pengembangan kemitraan usaha
 3. Percepatan integrasi sistem perizinan
 4. Promosi investasi terarah
 5. Pendampingan realisasi investasi skala besar di industri, pariwisata dan infrastruktur: debottlenecking dan aftercare investasi agar tidak pindah ke negara lain.

c. Ekonomi Kreatif

1. Bantuan Pemulihan Dampak Ekonomi berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 3.400 KK. Jumlah tersebut disebar ke 17 Kab/Kota (200 KK/Kab Kota)
2. Bimbingan Teknis sebanyak 15 Kegiatan untuk 365 Pelaku Usaha di 8 Kabupaten/Kota.
3. Fasilitasi Sertifikat Produk Halal untuk 30 Pelaku Usaha di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Fasilitasi Perbaikan Kemasan untuk 33 Pelaku Usaha di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pendampingan Pengurusan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) untuk 256 Pelaku Usaha
6. Pendampingan Sertifikasi P-IRT untuk 142 Pelaku Usaha.
7. Pendampingan Pengurusan Merek untuk 180 Pelaku Usaha.
8. Bantuan Mesin dan Peralatan Perbengkelan Sepeda Motor untuk 20 KUB di Kota Palembang.
9. Bantuan Mesin Pengembangan Sentra IKM Makanan untuk 10 KUB di Kota Palembang dan 10 KUB di Kab. Banyuasin.
10. Bantuan Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan Perikanan untuk 20 KUB di Kab. OKI.

Selain itu permasalahan-permasalahan lain yang muncul dalam Pariwisata dan Ekonomi Kreatif khususnya di Provinsi Sumsel yaitu:

- 1) Belum maksimalnya pemerataan pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata di Sumatera Selatan;
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota belum menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan ;
- 3) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Pariwisata yang berkompeten;
- 4) Belum optimalnya peran masyarakat dalam kepariwisataan;
- 5) Masih kurangnya minat industri pariwisata untuk mempromosikan destinasi pariwisata Sumatera Selatan
- 6) Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tersertifikasi secara nasional masih rendah
- 7) Investor cenderung wait and see menanamkan modalnya karena pertumbuhan ekonomi secara nasional melambat sehingga berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan
- 8) Komoditi ekspor Sumatera Selatan pada umumnya masih berupa produk primer sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal
- 9) Promosi tentang peluang investasi di Sumsel belum optimal
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam industry
- 11) Belum terwujudnya industri hilir berbasis sumber daya alam Sumsel (karet, sawit, kopi dan batubara).

4. Bidang Pemuda dan Olahraga

- a. Melalui prioritas daerah Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi dijabarkan dalam program

prioritas daerah Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan prioritas daerah yaitu; (1) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, (2) Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, dan (3) Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

- b. Evaluasi yang harus dilakukan terhadap program-program kepemudaan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di daerah provinsi/kabupaten/kota adalah optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kepemudaan. Karena selama ini ada kegiatan-kegiatan Kemenpora di Dispora Daerah kabupaten/kota yang tidak dikoordinasikan dengan Dispora Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu target-target program kegiatan yang harus disusun bersama untuk meningkatkan Indek Pembangunan Pemuda (IPP).
- c. Program-program yang perlu ditingkatkan koordinasi, perencanaan dan penganggarannya antara lain, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda; pembinaan organisasi kepemudaan, pembinaan gerakan pramuka, Program Pertukaran Pemuda Antar Negara, Kapal Pemuda Nusantara, Jambore Pemuda Indonesia, Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih serta Penyuluhan Anti Narkoba Bagi Pemuda.
- d. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dimasa Pandemi COVID-19 selama setahun terakhir ini yang berdampak langsung terhadap program-program bidang kepemudaan dan keolahragaan adalah dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan nomor :1061/BKD.I/2020, tanggal 23 Maret 2020, Tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain terdapat pada angka 2 Surat Edaran tersebut, dimana ASN bekerja secara *Work From Home* (WFH) dan terdapat pada angka 4, antara lain berbunyi bahwa seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta agar ditunda atau dibatalkan dan penyelenggaraan rapat-rapat harus dilakukan secara selektif, prioritas dan urgensi dengan tetap mempedomani protokol kesehatan.Selanjutnya Surat Gubernur nomor : 094/1113/BPKAD/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Pemberitahuan Pembatasan Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas. Dengan mempedomani surat Edaran dimaksud, maka penyelenggaraan program-program kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di Dispora Provinsi Sumatera Selatan mengalami penyesuaian-penyesuaian.
- e. Ada program-program kegiatan yang ditiadakan untuk membatasi penyebaran COVID-19 yang begitu massif dan juga karena pengurangan anggaran melalui refocusing anggaran dalam pengelolaan pandemi COVID-19. Selain itu ada kegiatan yang tetap dilaksanakan, namun dengan aturan yang ketat melalui Potokol Kesehatan (Prokes). Untuk rencana kegiatan yang akan datang Tahun 2021 akan mempedomani Surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan nomor : 005/0633/Bappeda/2020, tanggal 02 Juni 2020, perihal Penajaman Renja-PD Tahun 2021, dimana prioritas anggaran antara lain untuk belanja wajib yang mengikat Kepala

Daerah, Kebijakan Pengelolaan Pandemi COVID-19, dan Program prioritas Target Visi dan Misi Gubernur dalam RPJMD 2019-2024.

- f. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama Pandemi COVID-19 perkembangan atlet dan sarana prasarana olahraga tetap dilakukan dalam rangka persiapan event nasional maupun internasional. Seperti kegiatan Gubernur Sumsel Super Series Badminton 2020/2021 dan Kegiatan Sriwijaya Shooting, yang bertujuan untuk menjaring bibit-bibit atlet di daerah, kegiatan ini diikuti oleh peserta dari 17 Kab/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan.
- g. Dalam Pembinaan di Bidang Olahraga Prestasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap melakukan pembinaan dengan memberikan bantuan uang pembinaan terhadap 131 atlet dan 59 pelatih untuk persiapan menuju PON XX Tahun 2021 di Papua. Seperti ; Bantuan uang pembinaan atlet berprestasi tiap bulan dengan standart Reguler Pratama, Madya dan Utama Sesuai dengan prestasinya serta bantuan uang pembinaan pelatih dengan standart Reguler Pratama, Madya dan Utama sesuai dengan prestasinya.
- h. Selain itu, Kementrian Pemuda dan Olahraga bersinergi dengan Dispora Provinsi dimana wadah pembinaan atlet dengan jenjang usia melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) yang tersentralisasi.
- i. Begitu juga dengan lintas sector seperti sekolah SONS (Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya) yang terdiri dari Atlet pilihan yang terseleksi dari tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- j. Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap melakukan renovasi dan persiapan dalam rangka persiapan kegiatan Tuan Rumah POPNAS, PEPARPENAS dan FIFA U-20. Selain memaksimalkan sarana dan prasarana juga melakukan pembinaan persiapan atlet untuk meraih prestasi yang terbaik, untuk Atlet Provinsi Sumatera Selatan yang memang termasuk didalam atlet PON secara otomatis mereka telah menyiapkan diri dengan program latihan Pelatda PON.
- k. Untuk persiapan sarana prasarana saat ini Provinsi Sumatera Selatan melakukan renovasi venue-venue yang berada di kawasan *Jakabaring Sport City* yang akan digunakan sebagai tempat dilaksanakannya POPNAS tahun 2021.
- l. Perkembangan Atlet dan sarana prasarana selama pandemic covid-19 tidak ada permasalahan. Pemanfaatan sarana prasarana tetap dilakukan dalam rangka persiapan event nasional maupun internasional.
- m. Permasalahan yang seringkali muncul diantaranya ;
 - 1) Masih kurangnya tenaga pendidik khusus olahraga, pelatih, dan atlet berprestasi
 - 2) Perlu peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk pendidikan olahraga.
 - 3) Sementara permasalahan yang paling krusial di Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah permasalahan anggaran yang sangat terbatas sehingga banyak Tujuan, sasaran dan program yang sudah tersusun (Renstra Dinas) akan sulit dilaksanakan bahkan bisa saja tidak dapat dilaksanakan secara

berkesinambungan dan konsisten. Hal ini yang menyebabkan ketidakefektifan program kegiatan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

- n. Adapun upaya yang sudah dan akan dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut adalah sebagai berikut;
 1. Memanfaatkan Fasilitas Olahraga dan Pembinaan yang Berkelanjutan;
 2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Keolahragaan melalui Pelatihan maupun Kursus;
 3. Pemassalan Olahraga dikalangan Masyarakat.
 4. Menyusun dan memformulasikan kembali Sasaran dan Target-target Program kegiatan dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian rencana strategis Dinas agar secara efektif dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan SDI (*Sport Development Index*). sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan 2021 ini adalah dengan kegiatan FGD dan RAD, yaitu menyusun dan memformulasikan secara Detail dan Fokus uraian-uraian target dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan sekaligus rencana penyusunan forum koordinasi dan sinkronisasi dalam satu meja antara Kemenpora, Dispora Pemprov, dan Dispora Pemkab/Kota baik dalam kebijakan, perencanaan, Penganggaran, IPP dan SDI (*Sport Development Index*).

5. Bidang Perpustakaan

- a. Melalui prioritas daerah Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Madani dan Berprestasi dijabarkan dalam program prioritas daerah Peningkatan Akses Pendidikan yang Berkualitas selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan prioritas daerah yaitu; (1) Pengelolaan Pendidikan dan Perizinan Pendidikan, (2) Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (3) Pengembangan Kurikulum, (4) Pengembangan Bahasa dan Sastra, (5) Pembinaan Perpustakaan, dan (6) Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.
- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 420/12553/Disdik.SS/2020 tentang Penundaan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap 2020/2021. Penundaan kegiatan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan masih tingginya kasus COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Himbuan kepada Bupati dan Walikota se Provinsi Sumsel untuk menunda pembelajaran tatap muka di semua satuan pendidikan dan dialihkan secara pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring/luring/modul pembelajaran lainnya. Penundaan pembelajaran tatap muka dilakukan sampai vaksin COVID-19 didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota dan setelah dilihat perkembangan kasus COVID-19 per daerah Kabupaten/Kota.
- c. Koleksi Deposit yang dimiliki Perpustakaan Provinsi Sumsel per 30 Desember 2020 terdiri dari :
 1. buku sebanyak 33.017 eksemplar.

2. terbitan berseri (majalah, surat kabar, buletin, jurnal, brosur, pamflet, peta, laporan sebanyak 102 judul
 3. pustaka kelabu (tesis, disertasi, skripsi) sebanyak 150 judul
 4. kaset (CD, DVD, VCD) sebanyak 150 judul
- d. Adapun permasalahan yang di hadapi perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu:
- 1) Budaya baca masyarakat Sumatera Selatan berada di kategori rendah yaitu 44,35%.
 - 2) Pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan masih banyak yang belum memenuhi standart nasional perpustakaan.

B. PERMASALAHAN DAN TEMUAN

1. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Dalam pemenuhan hak Pendidikan bagi peserta didik, maka kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dalam bentuk Belajar Dari Rumah (BDR) dengan mengkombinasikan 2 metode yaitu Daring (Dalam Jaringan) dan Luring (Luar Jaringan) berdasarkan pemetaan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki oleh orangtua peserta didik oleh satuan Pendidikan.
- b. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan BDR pada masa pandemi COVID-9 kendala yang dihadapi antara lain:
 - 1) Guru kesulitan mengelola Pembelajaran Jarak Jauh.
 - 2) Guru Kesulitan berkomunikasi dengan Orangtua.
 - 3) Tidak semua orangtua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggungjawab lainnya (kerja).
 - 4) Kesulitan orangtua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah.
 - 5) Tidak semua orangtua mempunyai fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh sehingga tidak memungkinkan untuk mengakses sumber belajar.
 - 6) Kuota internet menjadi beban bagi sebagian orangtua di masa pandemik COVID-19.
 - 7) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan
 - 8) Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik di daerah
 - 9) Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan
- c. Perguruan Tinggi Swasta dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) mengalami permasalahan diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Baik mahasiswa maupun dosen belum sepenuhnya memiliki penguasaan terhadap teknologi yang ada, bahkan terhadap pemilihan teknologi yang lebih tepat untuk digunakan.
 - 2) Belum semua lembaga pendidikan dapat memfasilitasi sarana komunikasi seperti kendala point a tersebut dengan segera.
 - 3) Hambatan keterbatasan jaringan, mahasiswa yang berdomisili jauh dari kota, hampir selalu ditemukan kendala sinyal. Akses ke sinyal

juga memerlukan dana yang memadai yang mungkin tidak dapat diatasi oleh semua mahasiswa.

- 4) Sulit melakukan kontrol terhadap lancarnya transfer pemahaman secara non-tatap muka. Beberapa kegiatan yang bersifat membina kebersamaan antar mahasiswa khususnya kegiatan praktik-praktik mata kuliah baik dilapangan maupun di laboratorium tidak dapat dilaksanakan karena pembatasan tidak bolehnya berkumpul dan berkerumun.
- 5) Komunikasi tatap muka memang merupakan bentuk komunikasi yang lebih berkualitas dibandingkan non-tatap muka, oleh karena itu proses pembelajaran yang 100% dilakukan secara non-tatap muka pasti mengurangi hasil yang diharapkan. Selain itu kreativitas mahasiswa sangat menurun karena terlalu lama berada dilingkungan keluarga dan tidak berinteraksi sesama warga kampus untuk berkreasi dan berinovasi.
- 6) Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan meningkatnya alokasi pendanaan untuk membantu masyarakat dalam menaggulangi COVID-19 dan dampaknya sehingga alokasi dana penelitian jadi menurun, oleh karena itu produktifitas para peneliti juga megalami penurunan.
- 7) Keterbatasan jaringan dan vasilitas dipedesaan menjadi hambatan untuk kegiatan secara online (daring) termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, oleh karena itu selama pandemi COVID-19 kegiatan pengabdian kepada masyarakat di fokuskan di lingkungan kampus dan perkotaan

2. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Permasalahan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Selatan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Belum maksimalnya pemerataan pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata di Sumatera Selatan;
- 2) Pemerintah Kabupaten/Kota belum menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan ;
- 3) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Pariwisata yang berkompeten;
- 4) Belum optimalnya peran masyarakat dalam kepariwisataan;
- 5) Masih kurangnya minat industri pariwisata untuk mempromosikan destinasi pariwisata Sumatera Selatan
- 6) Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tersertifikasi secara nasional masih rendah
- 7) Investor cenderung wait and see menanamkan modalnya karena pertumbuhan ekonomi secara nasional melambat sehingga berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan
- 8) Komoditi ekspor Sumatera Selatan pada umumnya masih berupa produk primer sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal
- 9) Promosi tentang peluang investasi di Sumsel belum optimal
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam industry
- 11) Belum terwujudnya industri hilir berbasis sumber daya alam Sumsel (karet, sawit, kopi dan batubara)

3. Bidang Pemuda dan Olahraga

Permasalahan yang ditemukan dalam pemuda dan olahraga:

- a. Perlu peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk pendidikan olahraga.
- b. Perkembangan aktivitas pemuda sejak awal pandemi hingga saat ini berjalan sangat dinamis, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan atau penerapan protokol kesehatan. Pembinaan generasi muda tidak bisa berhenti karena adanya pandemi. Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB/New Normal) menjadi tradisi baru (al-muhaafadhatul qodiiimishshaalih ma'al akhdzi bil jadiidil ashlah) dalam berbagai aktivitas kepemudaan demi mencegah, mengendalikan dan menanggulangi penyebaran COVID-19 (daf'ul mafaasid awla min jalbil mashaalih) dan menjadi bagian tak terpisahkan dari iktiar bersama seluruh komponen bangsa saat ini.
- c. Kepemudaan Provinsi Sumsel nenaksimplakan untuk penguatan dalam koordinasi lintas sektor guna menyamakan langkah dan target-target pembangunan kepemudaan dengan menempatkan pemuda tidak hanya sebagai obyek melainkan juga subyek pembangunan itu sendiri.
- d. Masih kurangnya tenaga pendidik khusus olahraga, pelatih, dan atlet berprestasi.
- e. Permasalah dibidang olahraga di Sumsel banyak terkendala dgn sistem pembinaan berjenjang yang tidak dilakukan secara konsisten, minimnya pelatih dengan sertifikasi/berkualitas, kurangnya pengembangan teknologi olahraga yang belum bisa diserap oleh para pelatih, hal – hal yang menyangkut talent yang berkualitas juga belum bisa diperoleh karena masih minimnya minat olahraga prestasi masyarakat terhadap olahraga tertentu. Sedangkan di Bidang Kepemudaan belum terukurnya formulasi secara detail target-target program-program kegiatan untuk meningkatkan Indek Pembangunan Pemuda (IPP). Disamping itu belum optimalnya koordinasi kelembagaan kepemudaan baik dalam perencanaan (kebijakan) maupun dalam pelaksanaan antara Kemenpora, Dispora Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- f. Penyelenggaraan program/kegiatan kepemudaan (misalnya : bidang kewirausahaan pemuda) oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan di daerah, tanpa koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga pengelola kepemudaan di daerah, akan tetapi langsung kepada obyek peserta/masyarakat.
- g. Tidak ada upaya koordinasi antara penyelenggaraan program/kegiatan di tingkat kementerian dengan unit kerja/instansi/lembaga pengelola kepemudaan di daerah;
- h. Kurang sinkronnya program/kegiatan bidang kepemudaan yang direncanakan/dilaksanakan oleh kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota.
- i. Beberapa program/kegiatan yang berada di tingkatan lebih tinggi kurang dan/atau tidak bersifat linier dengan program/kegiatan yang berada level bawahnya, dan sebaliknya.
- j. Pelaksanaan program peningkatan kapasitas kepemudaan oleh unit kerja/instansi/lembaga pengelola kepemudaan di daerah belum terkoordinir secara terpadu sehingga terkesan unit

kerja/instansi/lembaga pengelola kepemudaan di daerah berjalan sendiri-sendiri.

- k. Kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga RI menyiapkan kuota peserta hanya sedikit, terkadang tidak tersedia kuota sama sekali untuk negara tujuan sedangkan peserta yang mengikuti seleksi dan memenuhi persyaratan cukup banyak sehingga menimbulkan kekecewaan bagi peserta yang sudah lulus seleksi.
- l. Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia yang sudah terlaksana seperti di Provinsi Sulawesi Utara terkesan tidak siap dan berantakan seperti air bersih tidak tersedia dan MCK minim, tenda tidak sesuai standar jambore. Peserta banyak yang kurang merasa nyaman, hal ini mengakibatkan kekecewaan dari semua Provinsi di Indonesia.
- m. Kegiatan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN). Kegiatan ini merupakan kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dimana para peserta KIPAN yang seharusnya dipilih dan ditunjuk oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan melalui seleksi Kab/Kota, akan tetapi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI melakukan penyaringan sendiri melalui website kementerian yang pada akhirnya ada beberapa peserta yang tidak melaporkan utusan dari Kab/Kota mereka.
- n. Kegiatan Lomba Tausiah dan Lomba Tilawatil Qur'an yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan belum pernah dilaksanakan oleh Kementerian sehingga menyulitkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan koordinasi dengan Kementerian.
- o. Permasalahan yang dihadapi di Sumatera Selatan saat ini adalah belum maksimalnya Atlet dikarenakan Pelatih melakukan kegiatan Program latihan terkendala dengan adanya wabah COVID-19 seperti dihapusnya beberapa kegiatan rutin untuk atlet dan pelatih dikarenakan anggaran untuk kegiatan tersebut mengalami efisiensi anggaran yang dialihkan untuk pendanaan pada masa pandemi COVID-19. Contohnya; kegiatan Pelatihan Tenaga Keolahragaan.

4. Bidang Perpustakaan

Permasalahan yang sering muncul dalam bidang perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

- a. Budaya baca masyarakat Sumatera Selatan berada di kategori rendah yaitu 44,35%.
- b. Pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan masih banyak yang belum memenuhi standart nasional perpustakaan.

C. PEMBAHASAN (MASUKAN, SARAN, USULAN, DAN PANDANGAN)

Selama kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Selatan, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dan kunjungan lapangan, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI antara lain:

1. Pendidikan

- a. Dalam bidang pendidikan, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI mengapresiasi kebijakan, program-program dan inovasi yang tinggi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memajukan Pendidikan.
- b. Komisi X DPR RI mendorong selama masa Pandemi COVID-19 yang diperlukan diantaranya optimalisasi pelaksanaan kebijakan tersebut misalnya terkait sistem belajar mengajar, sarana dan prasarana pendukung (internet, perangkat telekomunikasi dll) dan evaluasi efektifitas dan dampak dari pelaksanaan pembelajaran daring selama masa Pandemi COVID 19.
- c. Komisi X DPR RI mendorong khususnya dalam Pendidikan Tinggi untuk tetap memberlakukan system monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang baik lewat kegiatan kendali mutu/akreditasi.
- d. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat secara bertahap mengembangkan kelancaran prasarana dan sarana untuk pengembangan/perbaikan jaringan komunikasi
- e. Komisi X DPR RI mendorong skema dalam penguatan Pendidikan bisa di dukung oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan baik sisi SDM maupun sisitem pembelajaran yang berkualitas.
- f. Perlu memastikan pengangkatan guru dengan skema anggaran yang pasti melalui pusat.
- g. Perlu investasi sumberdaya manusia merupakan prioritas kemajuan, pemerintah juga perlu menambah kualitas (ragam) dan kuantitas dana bantuan belajar secara proposional guna menjamin semua warga negara memperoleh hak pendidikannya.
- h. Perlu memfasilitasi program-program pelatihan/evaluasi yang mendorong pengembangan SDM agar dapat melakukan pengembangan diri yang baik di masing-masing tempat tugas. (memang ini sepenuhnya menjadi tugas penyelenggara pendidikan, tetapi tersedianya model-model pelatihan/evaluasi yang standar akan memudahkan lembaga pendidikan untuk melaksanakannya.
- i. Kemendikbud RI menyampaikan BOP Museum dan Taman Budaya TA 2021 untuk Provinsi Sumatera Selatan dengan 2 sasaran sebesar Rp.3.100.000.000 untuk BOP Museum dan 1 sasaran sebesar Rp1.750.000.000 sehingga jumlah alokasi sebesar Rp.4.850.000.000 dan bantuan kepada 30 sekolah sebesar Rp. 35.000.000 di wilayah Sumatera Selatan dengan total Rp. 1.050.000.000.

2. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Dalam upaya memajukan pariwisata di daerah, menyampaikan beberapa masukan untuk pemerintah pusat, khususnya Kemenparekraf/Baparekraf RI, sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Pusat untuk memberikan dukungan bantuan terhadap hotel-hotel terutama yang dipergunakan untuk isolasi mandiri.
 - 2) Pemerintah pusat untuk memberikan dukungan promosi pariwisata, baik dalam bentuk event kepariwisataan, maupun promosi dalam bentuk digital dan media cetak.
- b. Kemenparekraf RI menyampaikan dukungan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk Provinsi Sumatera Selatan TA 2021 sebesar Rp. 5.171.227.000,-

3. Pemuda dan Olahraga

- a. Terhadap kebijakan dan regulasi dibidang kepemudaan dan Keolahragaan selama masa pandemi COVID-19, Dispora Provinsi Sumatera Selatan tetap mempedomani dan mematuhi Kebijakan dan regulasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Lembaga Penegak Hukum, dan Satgas COVID-19.
- b. Dispora Provinsi Sumatera Selatan akan mempedomani UU No. 3 Tahun 2005 terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dispora, khususnya yang berhubungan pada pemberdayaan Kepemudaan dan dengan program-program kegiatan Kewirausahaan Pemuda yang telah direkomendasikan Bappenas dan Kemenpora dalam rangka penciptaan wirausaha-wirausaha muda di Indonesia umumnya dan Sumatera Selatan khususnya.
- c. Respon Dispora saat ini yang terkait dengan ekonomi kreatif dan pemberdayaan kepemudaan dan atau kewirausahaan pemuda masih sebatas short-course kewirausahaan pemuda melalui kegiatan kursus perbengkelan, salon, dan lain-lain. Dengan adanya rencana pembentukan forum Koordinasi dan sinkronisasi Program kegiatan antar kelembagaan kepemudaan dan tenaga ahli dibidangnya diharapkan akan menghasilkan formulasi atau point-point penting ekonomi kreatif kewirausahaan pemuda di Sumatera Selatan.
- d. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada forum rapat teknis nasional maupun insidentil sesuai kebutuhan informasi di daerah.
- e. Kemenpora RI menyampaikan Kegiatan Dekonsentrasi TA 2021 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari (1) pembinaan PPLP sebesar Rp3.029.970.000,- (2) Pelatihan Tenaga Keolahragaan sebesar Rp150.000.000, - dan (3) Jambore Nasional Pemuda sebesar Rp106.905.000,.

4. Perpustakaan

- a. Dalam rangka untuk memajukan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan masukan dan pandangan agar pemerintah pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan.
 - 2) Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
 - 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan serta menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air.
 - 4) Mengembang sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem Pendidikan nasional.
- b. Perpunas RI menyampaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2021 untuk Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 15.196.800.000.

D. USULAN DAN ASPIRASI

Selain pandangan dan masukan yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat usulan yang disampaikan, yaitu:

1. Meminta Pemerintah khususnya Kemenpora untuk mempertimbangkan cabang olah raga yang tidak di pertandingan untuk di ikut sertakan dalam event nasional, karena menjadi proyeksi untuk provinsi Sumatera Selatan.
2. Dukungan pengembangan potensi budaya dan museum yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sebagai potensi pengembangan wilayah dari bidang kebudayaan dan pariwisata.
3. Dalam revisi UU No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan pramuka untuk memasukan kejelasan anggaran Gerakan Pramuka agar tidak multi tafsir dalam pembiayaan dan penganggaran kegiatan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari berbagai pertemuan dan kunjungan lapangan yang telah dilakukan, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan berjalan dengan baik dan lancar namun ada beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan;
 - 2) Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh atau Belajar Dari Rumah masih banyak menyisakan kendala baik infrastruktur (Jaringan, Listrik, Gawai dll), sulitkan komunikasi guru ke peserta didik maupun orang tua, dan kurangnya kompetensi untuk adaptif terhadap teknologi;
 - 3) Kurang meratanya distribusi tenaga pendidik di daerah;
 - 4) Rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - 5) Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang tersertifikasi secara nasional masih rendah.
 - b. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1) Belum maksimalnya pemerataan pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata di Sumatera Selatan;
 - 2) Pemerintah Kabupaten/Kota belum menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan;
 - 3) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia Pariwisata yang berkompeten;
 - 4) Belum optimalnya peran masyarakat dalam kepariwisataan;
 - 5) Masih kurangnya minat industri pariwisata untuk mempromosikan destinasi pariwisata Sumatera Selatan;
 - 6) Investor cenderung *wait and see* untuk menanamkan modalnya karena pertumbuhan ekonomi secara nasional melambat sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan;
 - 7) Komoditi ekspor Sumatera Selatan pada umumnya masih berupa produk primer sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal;
 - 8) Promosi tentang peluang investasi di Sumatera Selatan belum optimal

- 9) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam industry; dan
 - 10) Belum terwujudnya industri hilir berbasis sumber daya alam Sumsel (karet, sawit, kopi dan batubara).
- c. Bidang Pemuda dan Olahraga
 - 1) Masih kurangnya tenaga pendidik khusus olahraga, pelatih, dan atlet berprestasi;
 - 2) Perlu peningkatan dan pengembangan serta perawatan sarana dan prasarana untuk pendidikan olahraga;
 - 3) Perlu revisi UU No. 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka dan memasukan kejelasan anggaran Gerakan Pramuka agar tidak multi tafsir dalam pembiayaan dan penganggaran kegiatan; dan
 - 4) Perlu pelatihan dan jaringan komunitas yang mendukung pemuda berwirausaha.
 - d. Bidang Perpustakaan
 - 1) Budaya baca masyarakat Sumatera Selatan berada di kategori rendah yaitu 44,35%; dan
 - 2) Pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan masih banyak yang belum memenuhi standart nasional perpustakaan.
2. Dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan telah disampaikan alokasi anggaran atau program dari mitra kerja Komisi X DPR RI untuk Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:
 - a. Kemendikbud RI menyampaikan BOP Museum dan Taman Budaya TA 2021 untuk Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp.4.850.000.000, BOP Museum Kota Palembang Rp. 600.000.000 dan bantuan kepada 30 sekolah sebesar Rp. 35.000.000 di wilayah Sumatera Selatan dengan total Rp. 1.050.000.000 serta DAK Fisik Bidang Pendidikan TA 2021 kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan senilai Rp. 721.389.310.000,-.
 - a. Kemenparekraf RI menyampaikan dukungan pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk Provinsi Sumatera Selatan TA 2021 sebesar Rp. 5.171.227.000,-
 - b. Kemenpora RI menyampaikan Kegiatan Dekonsentrasi TA 2021 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari (1) pembinaan PPLP sebesar Rp3.029.970.000,- (2) Pelatihan Tenaga Keolahragaan sebesar Rp150.000.000, - dan (3) Jambore Nasional Pemuda sebesar Rp106.905.000,-.
 - c. Perpunas RI menyampaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2021 untuk Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 15.196.800.000.

IV. REKOMENDASI

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk terus fokus dalam memajukan kebudayaan, menjaga dan mengelola Cagar Budaya,

museum serta fokus dalam peningkatan pusat kegiatan seni dan budaya dengan memperhatikan protokol Kesehatan selama masih berlangsungnya Pandemi COVID-19.

2. Mendorong Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan K/L dan Pemda, khususnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk memastikan fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh seperti jaringan listrik, jaringan komunikasi, dan perangkat belajar, yang menjadi permasalahan-permasalahan dalam bidang Pendidikan khususnya permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah di Sumatera Selatan agar dapat berjalan dengan lebih baik.
3. Mendorong Kemenparekraf RI untuk membantu Pemerintah Sumatera Selatan agar mampu memaksimalkan pemerataan infrastruktur, peningkatan SDM (pariwisata dan ekonomi kreatif), memanfaatkan teknologi dan memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry.
4. Mendorong Kemenpora RI untuk membantu memfasilitasi Pemerintah Sumatera Selatan dalam mengatasi permasalahan sebagai berikut:
 - a. kurangnya tenaga pendidik khusus olahraga, pelatih, dan atlet berprestasi.
 - b. perlunya peningkatan dan pengembangan serta perawatan sarana dan prasarana untuk pendidikan olahraga.
 - c. untuk mempertimbangkan cabang olah raga yang tidak di pertandingkan dalam kompetisi nasional agar di ikut sertakan, karena menjadi proyeksi untuk Provinsi Sumatera Selatan.
 - d. Perlunya keterampilan kewirausahaan bagi pemuda.
5. Mendorong Perpurnas RI untuk bersinergi dengan Pemerintah Sumatera Selatan agar dapat memenuhi standar nasional perpustakaan dan meningkatkan budaya baca masyarakat.

V. PENUTUP

Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait. Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Masa Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 Komisi X DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 22 Febuari 2021

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X,**

Ttd.

Agustina Wilujeng Pramestuti, SS, MM
A-185